

**Perempuan, Teologi, dan Kekuasaan
(Relasi Diskursif antara Kuasa dan Kebijakan atas Perempuan
Arab Saudi)**



Oleh :

M. Syaiful Kamal, S.Hum

NIM : 17200010119

TESIS

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A.)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Kajian Timur Tengah**

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Syaiful Kamal, S.Hum
NIM : 17200010119
Jenjang : Magister
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Yogyakarta, 6 Desember 2019

Saya yang menyatakan



M. Syaiful Kamal, S.Hum

NIM: 17200010119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Syaiful Kamal, S.Hum
NIM : 17200010119
Jenjang : Magister
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.
Jika kemudian di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak
sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Desember 2019

Saya yang menyatakan



M. Syaiful Kamal, S.Hum

NIM: 17200010119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-409/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : PEREMPUAN, TEOLOGI, DAN KEKUASAAN (Relasi Diskursif antara Kuasa dan Kebijakan atas Perempuan Arab Saudi)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. SYAIFUL KAMAL, S.Hum
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010119
Telah diujikan pada : Senin, 16 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subi Nur Isnaini
NIP. 19860818 201903 2 010

Penguji II

Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D.
NIP. 19800963 000000 1 301

Penguji III

Rofah, M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200112 2 002

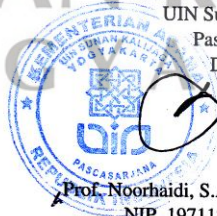
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga

Pascasarjana

Direktur



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PEREMPUAN, TEOLOGI, DAN KEKUASAAN (RELASI DISKURSIF ANTARA KUASA DAN KEBIJAKAN ATAS PEREMPUAN ARAB SAUDI)

Yang ditulis oleh :

Nama : M. Syaiful Kamal, S.Hum
NIM : 17200010119
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (M.A.).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 Desember 2019
Pembimbing

Dr. Yunus Masrukhin, Lc, M.A.

ABSTRAK

M. Syaiful Kamal. 2019. *Perempuan, Teologi, dan Kekuasaan (Relasi Diskursif antara Kuasa dan Kebijakan atas Perempuan Arab Saudi)*. Tesis. Program Magister Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di negara-negara muslim, salah satu poin yang paling fundamental dan berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan adalah faktor identitas yaitu identitas Islam. Di Arab Saudi, kebijakan-kebijakan yang diterapkan tidak luput melalui musyawarah antara pihak kerajaan dan para dewan ulama yang memiliki otoritas tinggi dimata masyarakat. Termasuk visi 2030 Arab Saudi yang dicetuskan oleh Muhammad bin Salman juga tidak terlepas dari peran sentral para ulama dalam melegitimasi beberapa kebijakan yang bertentangan dengan kondisi sosial masyarakat di negara tersebut.

Visi besar ini harus mampu diterima masyarakat Arab Saudi agar negara tersebut tidak lagi tergantung dengan hasil minyaknya yang merupakan sumber utama pemasukan negara. Sebuah proses yang sangat panjang dan memerlukan banyak upaya baik dari segi politik, budaya, agama, sosial, dan ekonomi tentunya. Isu tentang gender dan perempuan menjadi langkah utama dalam mensukseskan reformasi Arab Saudi sehingga kebijakan ini akan menjadi pusat perhatiandunia dan memberikan peluang bagi kerajaan untuk menata kembali ketahanan dan suplemasi politiknya serta memperbaiki citra negatif yang didapatkan pihak kerajaan.

Tulisan ini akan mencoba melihat relasi diskursif bagi ulama dalam mengawal dan melegitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang direpresentasikan oleh pihak kerajaan. Bagi Michel Foucault, kekuasaan tidak sebatas pada institusi, birokrasi atau negara melainkan juga proses redistribusi pengaruh mengubah pola berpikir seseorang. Penulis menemukan bahwa hubungan saling membutuhkan dan ketergantungan satu sama lain masih mewarnai proses perpolitikan negara tersebut dan bagi kerajaan, cara terkuat dalam mempertahankan kekuasaannya adalah dengan menjalin hubungan baik dengan para ulama. Selain itu, berbagai kebijakan yang menyangkut perempuan juga memberikan dampak efektif dan nyata dalam menjaga stabilitas kerajaan Arab Saudi.

Kata Kunci: Ulama, Politik, Kekuasaan, Kebijakan, dan Perempuan.

MOTTO

وكن مستفدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور الفوائد

“Jadikanlah hari-harimu untuk menggapai faidah dengan menambah ilmu dan berenanglah dalam lautan-lautan faidah”

(Kitab Ta’lim Muta’allim Karya Syaikh al-Zarnuji)

“Kunci sukses rihlah ilmiah adalah restu orang tua, doa para kiai, dan serius dalam berusaha. Insya Allah anda lebih sukses lagi. Semangat yahhh”

(Pesan Prof. Dr. Nadirsyah Hosen, LLM, M.A, Ph.D kepada penulis via *facebook*)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan teruntuk Ayah dan Ibu tercinta Nasrudin dan Siti Mujayanah, serta Adik saya satu-satunya Ulwiyatus Sa'adah.

Terima kasih untuk setiap pengorbanan, nasehat, serta untaian do'a yang selalu dipanjatkannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena dengan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Perempuan, Teologi, dan Kekuasaan (Relasi Diskursif Antara Kuasa dan Kebijakan Atas Perempuan Arab Saudi)” dengan lancar dan maksimal. Atas ridho dan pertolongan-Nya penulis juga mendapatkan hal-hal baru, baik berupa pengetahuan maupun pengalaman selama melakukan penulisan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu, bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana, Ibu Ro’fah, BSW., P.hD., dan Dr. Roma Ulinuha, M.Hum., sebagai ketua dan sekretaris prodi *Interdisciplinary Islamic Studies*, serta koordinator konsentrasi Kajian Timur Tengah, Dr. Ibnu Burdah, M.A. Terima kasih kepada seluruh dosen Pascasarjana yang telah memberikan segala curahan ilmu pengetahuan, berbagai pandangan-pandangan yang membuka paradigma baru buat penulis serta berbagai kisah-kisah dalam menghadapi proses kehidupan akademik yang semuanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih tak terhingga kepada Bapak Dr. Yunus Masrukhin, Lc., M.A., selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan, saran, kritikan yang membangun, maupun gagasan-gagasan kepada penulis demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Atas kritik dan saran beliau tesis ini menjadi lebih berbobot dan bernilai secara akademik serta bisa diselesaikan dengan baik meskipun tentunya masih banyak kekurangan dari penulisan tesis ini.

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungannya selama ini. Tak lupa juga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang begitu dalam kepada kedua orang tua tercinta Bapak Nasruddin dan Ibu Siti Mujayanah, serta adik kandung saya, Ulwiyatus Sa’adah (semoga studi masternya lancar dan cepat selesai) yang selalu memanjatkan do’a, dukungan, nasehat, serta dorongan mental maupun material. Sehingga penulis mampu menyelesaikan studi master dan tesis di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini. Sekali lagi terima kasih yang mendalam dan maafkan penulis karena belum bisa menjadi anak yang bisa membahagiakan dan dibanggakan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan salam ta’dzim kepada Abah Na’im Salimi dan Ibu Nyai Siti Chamnah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk tetap bisa mengabdikan dan belajar di PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta. Teman-

teman pondok terutama dewan pendidikan dan pengurus yang telah kebersamai penulis dengan berbagai dinamika dan lika-liku di dalamnya serta seluruh santri PP. Al-Luqmaniyyah yang semoga kita selalu diberikan yang terbaik dalam segala hal oleh Allah SWT.

Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan konsentrasi Kajian Timur Tengah atas kebersamaannya selama proses perkuliahan mulai tahun 2017-2019 yang meskipun terasa cukup singkat akan tetapi memberikan berbagai pelajaran-pelajaran yang berharga dalam kehidupan. Semoga kita semua diberi kesempatan oleh Yang Kuasa agar mampu berkontribusi secara akademik dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar, serta bisa memberikan teladan baik untuk generasi berikutnya.

Semoga apa yang penulis peroleh selama kuliah di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi pribadi penulis. Sebagai manusia yang tidak terlepas dari nilai positif dan negatif menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar isi penulisan tesis ini bisa sempurna dan bermanfaat.

Yogyakarta, 6 Desember 2019

Penulis

M. Syaiful Kamal

NIM: 17200010119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kajian Pustaka	15
E. Kerangka Teori	21
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika pembahasan.....	31
BAB II: KEKUASAAN ULAMA DAN KERAJAAN ARAB SAUDI	
A. Sejarah Kemunculan Wahabi dan Pertarungan dalam Memperluas Pengaruhnya di Arab Saudi	34
a. Muhammad bin Abdul Wahhab.....	35
b. Konsep Ajaran Wahabi.....	39
c. Pertarungan dan Perebutan Pengaruh di Dunia Arab	44
B. Kuasa Ulama dan Kerajaan Arab Saudi dalam Menentukan Kebijakan.....	56
C. Visi 2030 dan Reformasi Perempuan Masa Muhammad bin Salman	64
BAB III: TEOLOGI PATRIARKISME ISLAM DAN POLITIK PENGETAHUAN	
A. Politik, Ulama, dan Legitimasi Kekuasaan.....	77
a. Aktivisme Politik	89

b. Evolusi Sosial	93
B. Kesetaraan Gender di Arab Saudi.....	98
C. Perempuan dan Patriarkhisme Islam	104
BAB IV : ISU GENDER, PEREMPUAN SAUDI, DAN WACANA MODERNISASI	
A. Islam dan Isu Gender	115
B. Tantangan Sosial dan Kebebasan Perempuan Arab Saudi	122
a. Kepentingan Keamanan Kerajaan	129
b. Kepentingan Ekonomi	131
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	140
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	144
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara-negara muslim, salah satu poin yang paling penting dan berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan adalah faktor identitas yaitu identitas Islam dan atau identitas Arab bagi negara-negara Arab. Namun besaran pengaruhnya tergantung atas kuat tidaknya identitas tersebut dalam struktur negara, jika identitas itu kuat maka rezim yang berkuasa di negara tersebut akan senantiasa menjaga kebijakan-kebijakannya sejalan dengan identitas tersebut.¹

Dalam beberapa kasus dan peristiwa di Timur Tengah, identitas sangat berpengaruh dalam proses perpolitikan negara-negara tersebut. Misalnya, salah satu alasan fundamental mayoritas negara-negara di Timur Tengah tidak berani menjalin hubungan diplomatik dengan Israel adalah karena faktor opini publik mayoritas masyarakatnya yang anti Israel, sehingga ditakutkan akan mengancam stabilitas politik sebuah negara Timur Tengah jika menjalin kerjasama dengan Israel.² Termasuk revolusi Iran tahun 1979 yang sangat kental membawa slogan-slogan Islam sebagai kunci utama dalam memobilisasi massa untuk meruntuhkan sebuah rezim menjadi contoh nyata akan pentingnya sebuah identitas Islam dalam kawasan tersebut.

¹ Raymond Hinnebusch, *The International Politics of the Middle East* (Manchester: Manchester University Press, 2003), 93.

² Hasbi Aswar, "Pengaruh Ulama Dalam Politik Di Negara Muslim: Studi Kasus Arab Saudi," *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 2 (March 2015): 87.

Agama sebagai ideologi juga berpengaruh terhadap hubungan internasional bisa dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, bahwa agama bisa menjadi sumber legitimasi bagi aktor pembuat kebijakan atau para penentangannya baik secara domestik maupun internasional. Dalam negara yang memiliki identitas keagamaan tertentu, maka setiap pemimpin akan menjadikan identitas agamanya sebagai *worldview* yang akan membatasi setiap perilakunya dan secara otomatis agama akan menjadi legitimasi setiap perbuatannya. Dalam kasus yang lain, sebuah negara yang mayoritas masyarakatnya cenderung memiliki identitas agama yang relatif homogen, maka akan sangat berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan pemimpinnya. Kedua, beberapa isu dan konflik yang berlandaskan agama bisa bersifat lintas batas, *cross border* dan menjadi isu internasional. Banyak kasus dimana negara-negara melakukan intervensi atau terlibat dalam penanganan konflik karena didorong oleh kesamaan agama, seperti keterlibatan negara-negara muslim dalam membantu Palestina. Begitu juga, konflik-konflik yang bermotif agama di sebuah wilayah bisa menginspirasi konflik di wilayah yang lain. Terakhir, munculnya fenomena transnasionalisme Islam yang memiliki tujuan mengubah sistem dunia yang sekuler menjadi Islam.³

Agak sulit untuk bisa memilih perilaku sebuah aktor yang mengatasnamakan identitas tertentu seperti Islam untuk mengatakan bahwa perilaku mereka adalah karena pengaruh identitasnya atau hanya menjadikan

³ Jonathan Fox and Shmuel Sandler, *Bringing Religion into International Relations* (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 163–165.

Islam sebagai topeng untuk kepentingan politik tertentu. Namun, dalam argumen yang dibangun oleh Fox dan Sandler yang ditulis oleh Hasbi Aswar, identitas agama bisa sangat berpengaruh terhadap politik luar negeri sebuah negara, baik karena negara tersebut beridentitaskan agama tertentu sehingga pemimpinnya harus patuh pada identitas tersebut, atau mayoritas masyarakat di negara tertentu menganut agama (Islam) sehingga pemimpinnya sangat memperhatikan faktor Islam terhadap seluruh kebijakannya.⁴

Politik dalam pandangan Mechiavelli, hanya digunakan untuk menyebut dan mengingatkan para pangeran (kelompok elite), bahwa mereka benar-benar saling berperang demi kekuasaan, bukan demi prinsip-prinsip mulia yang seringkali diobrolkan.⁵ Seringkali agama yang bermuatan moral menjadi alat kekuasaan agar elite lain tidak “mengganggu” kekuasaannya. Oleh karena itu semestinya raja harus mencari penghargaan dan kemuliaan dari rakyat demi kekuasaan yang diperolehnya. Rakyat hanya membutuhkan ketenangan untuk bekerja mencapai kemakmuran dan rasa aman.⁶

Secara umum, hak-hak perempuan dianggap telah mendapatkan signifikansi yang kuat di masa modern, khususnya dalam dunia Islam. Namun, secara historis perempuan masih juga tetap ter subordinasi oleh laki-laki. Perempuan dianggap sebagai “jenis kelamin kedua”. Perempuan adalah makhluk

⁴ Aswar, “Pengaruh Ulama Dalam Politik Di Negara Muslim: Studi Kasus Arab Saudi,” 88–89.

⁵ Abdelwahab El-Affendi, *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 7.

⁶ Zainuddin Maliki, *Agama Priyai: Makna Agama Di Tangan Elite Penguasa* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), 39.

sosial yang penuh dengan ambiguitas dalam kehidupannya. Perempuan memiliki sisi-sisi keindahan yang sangat berguna untuk masyarakat, akan tetapi di sisi lain banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial dan diskriminasi hukum yang sangat merugikan perempuan dalam menunjukkan eksistensinya.

Pria dan perempuan merupakan dua insan yang diciptakan untuk saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Namun muncul wacana-wacana bahwa perempuan mendapatkan stigma lemah dan dikuasai pria, sehingga lahirlah gerakan feminisme. Saat ini, gerakan feminisme dapat dikatakan sebagai tren bagi para perempuan. Jika ada perempuan yang mengaku sebagai pejuang feminisme, maka dia akan dianggap sebagai orang dengan pemikiran yang maju dan cerdas. Akan tetapi mengaktualisasikan keadilan gender dalam dunia masyarakat bukanlah perkara yang dianggap mudah. Di Barat dengan kemajuan di bidang industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta memiliki tingkat pendidikan tinggi bagi kaum perempuan yang jauh lebih besar, dan mempunyai potensi lapangan pekerjaan dan kesetaraan gender yang jauh lebih besar, realitanya kaum perempuan masih menempati posisi subordinat.⁷ Banyak sekali contoh-contoh pemukulan istri yang dilaporkan oleh media USA selama pengadilan O.J. Simpson, yang diduga keras membunuh istrinya.⁸

Salah satu hal yang akan dilakukan oleh setiap kelompok agar mendapatkan pengakuan publik adalah dengan membangun makna pada

⁷ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 3.

⁸ Ibid.

sejarahnya, yakni memiliki dan menentukan sejarah mereka sendiri.⁹ Kesadaran akan ketidakadilan gender yang dirasakan dan dialami oleh kaum perempuan mulai mendapatkan perhatian ditandai dengan munculnya karya tulis muslimah pada akhir abad ke-19 sampai pada pertengahan abad ke-20. Kemudian para feminis Muslim mulai menulis tentang tema-tema gender, eksploitasi perempuan, serta sistem patriarki itu sendiri. Islam merupakan sebuah agama yang kehadirannya sangat menjunjung tinggi martabat dan hak-hak seorang perempuan, di sisi lain juga sangat kental dalam mewariskan pemahaman ketidakadilan gender jika tidak bisa memahaminya dengan benar.

Dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak dan keadilan gender, tidaklah mungkin mempertahankan hukum keluarga yang tidak egaliter, apalagi mempertahankan dominasi kaum laki-laki. Perubahan menjadi sangat dibutuhkan dalam kondisi tersebut. Bahkan di masyarakat yang sangat konservatif seperti di Arab Saudi dan Kuwait, kaum perempuan menuntut akan sebuah perubahan. Sangat mengherankan sebenarnya jika perempuan di Arab Saudi tidak boleh mengendarai mobil.¹⁰ Bahkan perempuan Arab Saudi terkesan lebih terpenjara (tidak bisa bergerak dengan leluasa) dalam kehidupan sosial. Kondisi ini berbeda dengan apa yang terjadi di Iran. Perempuan di Iran bukan hanya diizinkan untuk mengemudi mobil saja, akan tetapi juga dapat dipilih

⁹ Sarah Gamble, *Pengantar Memahami Feminisme Dan Postfeminisme* (Yogyakarta: JALASUTRA, 2010), 6.

¹⁰ Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 6.

sebagai anggota Parlemen meskipun ada batasan-batasan dalam hal berpakaian yang masih berlaku.

Dari ukiran sejarah yang sangat kental ini, Arab Saudi menjadi sebuah negara yang sangat kaku dan konservatif dalam permasalahan perempuan. Perempuan memiliki batasan-batasan yang sudah ditetapkan kerajaan dan tidak boleh dilanggar ataupun dirubah kebijakan tersebut tanpa ada perintah langsung dari kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi memang selama ini kerap dicap sebagai negara yang bersikap kurang adil dan kurang memperhatikan terhadap hak-hak serta permasalahan perempuan. Dalam *Global Gender Gap Report 2016* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum*, Arab Saudi berada pada deretan terbawah, tepatnya di peringkat 141 dari 144 negara.¹¹ *Global Gap Gender Report* merupakan sebuah kajian survei yang disusun sebagai laporan yang bertujuan untuk memeriksa dan memotret ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam empat bidang kritis, yakni kesempatan dan partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, pemberdayaan politik, serta kesehatan dan kelangsungan hidup. Semakin rendah peringkat suatu negara didalamnya, maka semakin besar pula kesenjangan gender yang terjadi di negara tersebut.

Terdapat tiga indikator ketidakadilan gender yang biasanya terjadi dalam sebuah lingkup masyarakat. Pertama, ketika laki-laki lebih banyak memiliki kesempatan, kebebasan, dan kehormatan sosial yang tinggi daripada perempuan

¹¹ “5 Kebijakan Baru Arab Saudi yang ‘Membebaskan’ Perempuan,” *kumparan*, accessed December 3, 2019, <https://kumparan.com/kumparannews/5-kebijakan-baru-arab-saudi-untuk-perempuan>.

dalam berbagai aspek. Kedua, hak kuasa dalam perkawinan dipegang oleh laki-laki dan juga hal-hal yang berkaitan dengan gender. Ketiga, dalam hal politik, ekonomi, maupun hukum kedudukan ataupun posisi laki-laki lebih banyak dan lebih mudah aksesnya daripada kaum perempuan.¹²

Menyikapi persoalan aktivitas perempuan di Arab Saudi, para aktivis Barat berpendapat bahwa tindakan dan aktivitas keseharian mereka mengindikasikan bahwa mereka tidak mempunyai hak untuk membuat keputusan. Mereka berpikir untuk mengembalikan tingkat persamaan antara laki-laki dan perempuan baik di rumah, tempat kerja, maupun pendidikan akan mengalami dan menghadapi tantangan besar dan penting karena akan merubah dan bertolak belakang dengan wajah pemerintahan Arab Saudi saat ini.¹³

Adanya perbedaan hukum antara satu negara Islam dengan yang lain terutama dalam permasalahan kaum perempuan jelas membuktikan bahwa perbedaan-perbedaan yang muncul lebih banyak terpengaruh oleh keadaan sosio-politik masing-masing negara daripada “perintah agama”, dan menunjukkan bahwa kitab suci dapat secara berbeda ditafsirkan oleh setiap pola pikir manusia. Jadi, salah satu premis utama kalangan pro-perubahan dan pencari hukum

¹² Anis Rosida, “Wacana Modernisasi dalam Tantangan Peradaban, Peran Perempuan Sebagai Tonggak Sejarah Arab Saudi,” *PALITA: Journal of Social-Religion Research* 3 (April 2018): 90.

¹³ R Inlehart and P Norris, *Rising Tide: Gender and Cultural Change around the World* (Cambridge University Press, 2004).

keluarga yang berkeadilan gender jelas, yaitu “Kitab suci harus diinterpretasi ulang dari sudut pandang pengalaman dan keadaan sejarah kita”.¹⁴

Jika dicermati, isu ketidaksamaan gender di Arab Saudi merupakan sebuah akibat keunikan sejarah budaya masyarakat Arab Saudi dan juga adanya campurtangan pemerintah dan unsur budaya serta agama terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakatnya. Ada kejadian-kejadian politik dan sosial yang ikut berkontribusi dalam meneguhkan posisi perempuan Arab Saudi dalam masyarakat. Pertama dan yang sangat fundamental adalah ditemukannya tambang minyak tahun 1930-an di kawasan tersebut sehingga menimbulkan perubahan skala besar di dalam pembukaan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Pendapatan ekonomi dari minyak yang meningkat tajam merubah seluruh gaya hidup dan tatanan struktur masyarakat Arab Saudi.¹⁵ Kedua, revolusi Iran yang terjadi pada Januari 1979 dengan menghasilkan berdirinya pemerintahan Islam yang baru di Iran juga berkat dukungan dan penguatan dari pemuka agama Arab Saudi, sehingga para pengamat menduga bahwa perubahan-perubahan masyarakat Arab Saudi terjadi karena pengalaman kecil yang dimiliki masyarakat dalam membuat kebijakan ke arah hak-hak perempuan.¹⁶

¹⁴ Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 6.

¹⁵ Rosida, “Wacana Modernisasi Dalam Tantangan Peradaban, Peran Perempuan Sebagai Tonggak Sejarah Arab Saudi,” 91.

¹⁶ Amani Hamdan, “Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievements,” *International Education Journal* (2005): 43.

Akan tetapi, semua keadaan sosial perempuan Arab di atas berubah drastis semenjak putra mahkota Muhammad bin Salman mulai mengambil alih kendali pemerintahan di Arab Saudi sehingga memunculkan harapan baru yang dikenal dengan istilah “*Vision 2030*” yang bertujuan untuk memajukan ekonomi negara Arab Saudi dengan tidak bergantung dengan hasil minyak yang selama ini menjadi sumber komoditas utama dalam mensuplai kekayaan negara tersebut. Salah satu cara untuk mencapai misi itu adalah dengan keterbukaan diri Arab Saudi dengan dunia modernitas yang selama ini sangat tidak diperhatikan bahkan kesannya dihindari oleh kerajaan tersebut. Munculnya “*Vision 2030*” ini juga berdampak baik terhadap masalah-masalah perempuan di sana. Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan beberapa kebijakan yang sangat mengejutkan terkait dengan kehidupan perempuan Arab. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Perempuan diizinkan mengemudi sendiri.
2. Perempuan bisa menduduki posisi pemerintahan.
3. Perempuan boleh masuk stadion dan menonton pertandingan sepak bola.
4. Arab Saudi membuka gym untuk kaum perempuan.
5. Olahraga Yoga ‘dihalalkan’ di Arab Saudi.
6. Perempuan Arab boleh menonton bioskop.

¹⁷ “Yoga Hingga Bioskop, 7 Hal Yang Kini Dihalalkan Oleh Arab Saudi - Global Liputan6.Com,” accessed December 3, 2019, <https://m.liputan6.com/global/read/3224899/yoga-hingga-bioskop-7-hal-yang-kini-dihalalkan-oleh-arab-saudi>.

Kebijakan-kebijakan di atas diambil oleh kerajaan Arab Saudi yang tentunya ada campur tangan dari Muhammad bin Salman yang bertujuan untuk memperlancar misinya dalam memperbaharui dan meningkatkan perekonomian negaranya tersebut. Baginya Arab Saudi tidak bisa terus mengandalkan sumber minyak sebagai alat utama dalam mendongkrak perekonomian masyarakat setempat, akan tetapi perlu adanya modernisasi-modernisasi yang selama ini ditolak oleh kerajaan Arab Saudi.

Akan tetapi sudah menjadi karakteristik kaum elite penguasa untuk mencari dan mempertahankan kekuasaannya. Biasanya upaya yang dilakukannya melalui institusi-institusi pembentuk kesadaran misalnya lembaga, pendidikan, pengetahuan bahkan juga agama, untuk mendukung kepentingan mereka. Berkaitan dengan hal ini, Zainuddin menyatakan bahwa semua elit mengarahkan energinya untuk kepentingan yang sama yakni berupaya mempertahankan kekuasaan kemudian mempertahankan setiap kebijakan-kebijakan yang mereka tempuh.¹⁸

Atas nama kebijakan negara, siapapun yang membangkang, tidak patuh, dan kritis terhadap pemerintah harus disingkirkan. Dua kekuatan yang dimiliki negara -dalam istilah Althusser¹⁹- *Repressive State Apparatuses* (RSA) dan *Ideological State Apparatuses* (ISA) menjadi kekuatan efektif untuk memaksakan keinginan dengan dalih kebijakan negara terhadap rakyat. Negara

¹⁸ Maliki, *Agama Priyai: Makna Agama Di Tangan Elite Penguasa*, 7.

¹⁹ Louis Althusser, *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultur Studies* (Yogyakarta: Jalasutra, 2004).

dengan dalih sebagai pemegang otoritas sangat memanfaatkan *power* secara efektif sebagai alat produksi untuk menghegemoni, dan hanya negara yang memiliki kekuatan tersebut.

Oleh sebab itu bagi Michel Foucault, memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan tentang apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan harus didekati dengan mengajukan sebuah pertanyaan bagaimana kekuasaan itu beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan.²⁰ Dengan begitu kekuasaan harus dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi didalamnya. Kekuasaan merupakan sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi tersebut. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi yang menimbulkan dampak semakin kuatnya relasi kekuatan.

Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan kepemilikan, dalam konteks siapa menguasai siapa ataupun siapa yang *powerfull* sementara yang lain adalah *powerless*. Kekuasaan akan bertebaran dimana-mana (*omnipresent*) disebabkan kekuasaan selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi.²¹ Secara implisit, Foucault juga mengatakan bahwa rezim wacana merupakan suatu bentuk dari kekuasaan tersebut. Wacana bisa berbentuk praktik-praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan, yang mengubah konstelasi sosial, serta

²⁰ Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik," *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT* Vol. 18, No. 1 (January 2013): 78.

²¹ *Ibid.*, 80.

wacana sebagai yang memiliki otonomi dalam mengklaim atas kebenaran dan kontekstualisasi pengetahuan.²² Oleh karena itu, dalam pandangan Foucault, tidak ada suatu kebenaran atau pengetahuan yang mutlak dan bersifat final. Kebenaran tidak lain hanyalah kasus-kasus khusus mengenai kekeliruan yang pada suatu masa tertentu diakui otoritatif dan *legitimate*.²³

Memang hubungan antara pengetahuan dan otoritas kekuasaan di Arab Saudi terjalin sangat erat. Raja senantiasa berkonsultasi dengan ulama, yang dukungannya jelas sangat penting bagi keabsahan kekuasaannya.²⁴ Meskipun dalam beberapa hal ulama Arab Saudi ternyata juga tunduk pada tekanan-tekanan istana. Seperti menerima dalih yang diungkapkan Abdul Aziz bahwa radio itu halal karena dapat digunakan untuk menyiarkan ajaran-ajaran agama dan pengajian Al-Qur'an. Dia juga berhasil membujuk para ulama dengan menyatakan bahwa fotografi diperbolehkan meskipun seni lukis dilarang dengan alasan bahwa fotografi tidak mengandung unsur penyusupan faktor manusia dalam wewenang penciptaan, tetapi hanyalah merangkum sinar dan bayangan ciptaan Tuhan.²⁵

Dengan demikian, Arab Saudi bukanlah sebuah negara teokrasi akan tetapi sebuah kerajaan Islam yang rajanya merasa memperoleh kekuasaannya dari rakyat, dan dengan restu rakyat memerintah negara sesuai dengan hukum

²² Ibid., 81.

²³ Ibid., 82.

²⁴ Edward Mortimer, *Islam Dan Kekuasaan*, terj. Enna Hadi dan Rahmani Astuti. (Bandung: MIZAN, 1984), 157.

²⁵ Ibid., 159.

Tuhan. Prinsip utamanya raja mengakui kedudukan para ulama sebagai penafsir hukum, tetapi dalam kenyataannya dia menghimpun dan mengorganisir kekuasaan yang cukup luas, termasuk hal-hal yang menyangkut wewenang pembuatan undang-undang dalam segala aspek kehidupan baik dengan caranya yang sabar maupun dengan tekanan-tekanan yang diberikan kepada ulama agar mendapatkan restunya.

Oleh sebab itu, bagi penulis terdapat anomali dalam fenomena-fenomena yang terjadi di perpolitikan Arab Saudi tersebut. Agama yang merupakan sesuatu yang suci dan sebagai alat penyeimbang dan kerukunan dalam sebuah tatanan masyarakat seakan-akan menjadi alat politik buta yang mampu melegitimasi semua keinginan pemerintah dengan seketika itu juga. Masyarakat juga menerima kebijakan-kebijakan tersebut meskipun perubahan tersebut bersifat drastis dan pragmatis. Hal inilah yang akan penulis bahas didalam penelitian ini yaitu peran sentral ulama dalam mengawal dan melegitimasi keinginan-keinginan penguasa terkait kebijakan-kebijakan pemerintah terutama bagi perempuan Arab Saudi. Selain itu juga akan mengeksplorasi proses pengetahuan perempuan di sana yang pada masa awal-awal sangat patuh dengan kebijakan pemerintah akan tetapi seiring dengan kemajuan ilmu dan informasi mereka menyadari pentingnya arti kebebasan yang selama ini dibatasi oleh pihak ulama dan pemerintah Arab Saudi. Hal ini ditandai dengan munculnya para pejuang hak perempuan yang banyak dihukum oleh polisi akibat tindakannya

seperti tidak memakai jilbab, menyetir mobil sendiri, dan bepergian dari rumah tanpa sepengetahuan suami.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melenceng jauh dari pembahasan, maka permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini difokuskan pada arah kebijakan-kebijakan bagi perempuan Arab Saudi.

Berangkat dari permasalahan di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuasaan memproduksi sebuah kebijakan sosial dan pengetahuan dalam kehidupan masyarakat Arab Saudi?
2. Mengapa relasi kuasa ulama Arab Saudi dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang diambil kerajaan terkait isu perempuan Arab Saudi terjadi sangat kuat dan harmonis?
3. Bagaimanakah masa depan gender di Arab Saudi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan di atas penyusunan tesis ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran ulama (pengetahuan) sebagai alat

legitimasi sebuah kekuasaan.

2. Mengetahui proses terbentuknya karakter agama dan masyarakat yang mudah berubah seiring dengan kepentingan negara yang dibutuhkan.
3. Mengetahui kesiapan, kondisi sosial dan geopolitik Arab Saudi dalam merespon isu-isu gender yang nantinya akan merubah struktur tatanan masyarakat negara tersebut.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai konsep-konsep kekuasaan dan dinamika perubahan agama ketika kepentingan negara tidak sejalan dengan agama berdasarkan latar belakang studi kawasan di Arab Saudi yang terkenal sangat konservatif akan tetapi hal tersebut berubah-ubah dan terlihat dinamis sesuai dengan kepentingan politik yang dibutuhkan negara tersebut. Selain itu juga agar masyarakat umum memandang Arab Saudi sebagai negara seperti negara-negara lain, bukan negara yang suci yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memposisikannya tanpa ada unsur politik dan ekonomi meskipun semua orang tahu bahwa disanalah awal munculnya agama Islam.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu usaha untuk mengkaji dan meneliti karya-karya terdahulu. Berkaitan dengan tema yang sedang dan akan

diteliti. Tinjauan pustaka adalah bentuk pertanggungjawaban sebuah penelitian, sebagai salah satu upaya mengantisipasi terjadinya penjiplakan.

Dari hasil penelusuran pustaka terdahulu penulis menemukan beberapa karya yang membahas tentang reformasi Arab Saudi yang berdampak pada kehidupan sosial perempuan di sana. Jurnal tersebut berjudul "*Only for Women: Women, the State, and Reform in Saudi Arabia*" yang ditulis oleh Amelie Le Renard dan diterbitkan di *Middle East Journal*, Volume 62, Nomer 4 pada tahun 2008. Renard mengatakan bahwa perempuan Arab Saudi sudah lama menjadi objek kategorisasi, pemisahan, maupun diskriminasi secara hukum di negara tersebut. Akan tetapi untuk saat ini perempuan di sana harus dilihat dari konteks proyek politik dan transformasi negara Arab Saudi. Isu moderasi negara yang terus disuarakan oleh pejuang hak kebebasan wanita mulai dapat dirasakan.

Pemerintah Arab Saudi melalui lembaga-lembaganya sering mengadakan sebuah dialog nasional dengan jumlah peserta 70 orang dan setengah dari jumlah tersebut diisi oleh para wanita Arab Saudi. Dialog tersebut membahas topik-topik seputar *women's right and duties, women and work, women and education, women and society*. Peserta wanita yang diundang bukan saja wanita-wanita biasa, akan tetapi yang diundang dalam acara tersebut adalah para wanita yang memiliki posisi terkemuka di bidangnya masing-masing seperti dokter, profesor di bidang sosiologi, psikologi, ilmu hukum islam, ketua yayasan dan para pendiri asosiasi sosial keagamaan. Hasil dialog ini menghasilkan beberapa rekomendasi ataupun kebijakan yang harus dipikirkan dan diterapkan oleh pihak

pemerintah sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial dan peran wanita di negara tersebut.

Meskipun demikian, bagi Renard perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah Saudi hanyalah sebatas perubahan untuk menunjukkan bahwa pemerintah Saudi juga memiliki perhatian khusus untuk penduduk wanitanya. Selain itu perubahan-perubahan yang disuarakan kaum hawa melalui dialog tersebut untuk merubah *mindset* ataupun *worldview* muslim dunia bahwa Arab Saudi merupakan negara yang terus bergerak maju menuju sistem dan peradaban yang lebih demokrasi dan moderat.

Amani Hamdan dalam tulisannya di *International Education Journal* tahun 2005 dengan judul “*Women and education in Saudi Arabia: Challenges and achievements*” mengakui bahwa beberapa tahun terakhir ini tidak ada subjek yang lebih menarik untuk diperdebatkan dan didiskusikan selain tema perempuan dan peranannya dalam membangun sebuah negara. Apalagi jika masalah tersebut berkaitan dengan hak-hak perempuan di Arab Saudi.

Menurut Amani, peran perempuan Arab Saudi dalam dunia pendidikan di masyarakat bukan berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial melainkan secara tidak langsung sebagai kekuatan untuk menguatkan paham konservatisme. Bentuk hierarki gender nyata lainnya adalah distribusi dana pendidikan yang cukup besar bagi kaum laki-laki dibandingkan dengan dana pendidikan kaum perempuan Arab Saudi. Bahkan dalam tulisan tersebut diceritakan ada seorang perempuan bernama Fatina Amin Shakir yang ingin

belajar S3 ke luar negeri akan tetapi aplikasinya ditolak oleh Kementerian Pendidikan Arab Saudi dengan alasan hal tersebut dinilai tidak bermoral ketika mengizinkan wanita muda dan belum menikah untuk pergi belajar ke luar negeri. Meskipun akhirnya Fatina mendapatkan izin untuk belajar di luar negeri setelah dia dan ayahnya langsung menghadap dan memohon kepada raja Faishal yang dikenal sebagai pendukung pendidikan wanita. Dia menjadi salah satu wanita Arab Saudi pertama yang memiliki gelar Ph.D dari universitas di Amerika di bidang antropologi.

Belum adanya kemauan untuk membuka selebar-lebarnya keterbukaan berpikir bagi masyarakatnya terutama bagi perempuan menjadikan negara ini semakin tertinggal dari segi dunia pendidikan dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Penulis berargumen bahwa jika sebuah negara ingin bertahan hidup di era globalisasi maka pendidikan bagi perempuan juga harus menjadi prioritas utama. Tuntutan individu yang berpikiran terbuka akan membawa perubahan dan kemajuan dalam sebuah negara.

Akan tetapi Amani Hamdan juga meninggalkan sebuah pertanyaan besar terkait wacana ini, yaitu apakah masyarakat Arab Saudi siap menerima perubahan dan kemajuan tersebut mengingat peran beberapa ulama konservatif dan tradisi lama yang selalu menahan setiap langkah maju yang dilakukan masyarakatnya. Dalam tulisan ini begitu jelas dan runtut dinamika perjuangan perempuan Arab Saudi untuk memperoleh akses pendidikan yang bebas dan

layak bagi mereka akan tetapi belum sampai membahas perkembangannya sampai masa reformasi Arab Saudi.

Untuk melihat pandangan ulama negatif ulama Arab Saudi terhadap perempuan terdapat tulisan berjudul “*Kebebasan Perempuan dalam Perspektif Hadis*”. Tesis ini ditulis tahun 2015 oleh Abun Buniaga yang merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dia menjelaskan bahwa banyak hadis yang menjelaskan bagaimana perempuan seharusnya diperlakukan. Salah satu tujuan adanya penelitian ini adalah konstruk umum yang terbentuk dimana hadis-hadis yang berorientasi pada nuansa patriarki diposisikan istimewa dibandingkan dengan hadis-hadis misogonis. Padahal menurutnya, jumlah hadis yang mengangkat derajat perempuan dan mengistimewakannya tidak kalah banyak dibandingkan hadis-hadis yang terlihat mereduksi fungsi, peran, serta kualitas diri seorang perempuan.

Terdapat sebuah review tulisan yang diterbitkan di *The Arab Studies Journal* oleh *Arab Studies Institute* pada tahun 2014 yang membahas tentang marginalisasi ekonomi dan aturan ketat yang mengatur kehidupan sehari-hari kaum perempuan Arab Saudi. Penulisnya bernama Mona Kareem yang mereview buku dari Madawi Al-Rasheed yang berjudul “*A Most Masculine State: Gender, Politics, and Religion in Saudi Arabia*” yang dicetak oleh *Cambridge University Press* tahun 2013. Buku ini ingin mengeksplorasi hubungan erat antara gender, politik, dan agama dalam upaya menjelaskan model eksklusi perempuan Arab Saudi di ruang publik.

Berdasarkan penelitiannya, ulama religius Arab Saudi tidak memberi ruang dan posisi di negara maupun kantor-kantor karena “emosi” wanita dianggap akan mengganggu sebuah kinerja seseorang. Narasi seperti ini kemudian digunakan untuk mensubordinasi perempuan Arab Saudi dalam hal hukum, sosial, dan agama. Bahkan untuk mengontrol penampilan dan mobilitas mereka, tubuh perempuan disebut sebagai sumber fitnah atau lebih mengarah pada makna kekacauan bukan godaan.

Namun di akhir bukunya, secara keseluruhan Al-Rasheed berpendapat bahwa menghadapi negara adalah belum menjadi pilihan bagi penulis dan aktivis perempuan Arab Saudi. Sebuah ungkapan yang cukup memberi gambaran akan sulitnya menyuarakan, memperjuangkan dan merubah tatanan hak-hak perempuan Arab Saudi.

Kemudian ada sebuah jurnal yang mempresentasikan kondisi perempuan Arab Saudi sekarang ini setelah adanya visi 2030 Muhammad bin Salman berjudul “*Wacana Modernisasi dalam Tantangan Peradaban, Peran Perempuan Sebagai Tonggak Sejarah Arab Saudi*”. Jurnal ini ditulis tahun 2018 oleh Anis Rosida di *Journal of Social-Religi Research* dan menghasilkan kesimpulan bahwa perjuangan dan upaya perempuan Arab Saudi dalam berpartisipasi menjadikan negaranya lebih moderat mendapatkan apresiasi yang cukup besar, meskipun banyak sekali tantangan-tantangan penolakan dari aksi tersebut.

Potensi penolakan perubahan yang dicetuskan oleh pangeran Muhammad bin Salman akan menjadi resiko besar yang harus ditanggung oleh pihak

kerajaan mengingat perubahan yang disuarakan tersebut bersifat kontradiktif dengan kebijakan raja-raja sebelumnya yang menjadikan paham ultra-konservatif sebagai dasar pendirian negara. Untuk membuktikan upaya modernisasi ini, salah satu isu yang terus digencarkan adalah isu perempuan dan gender karena hal ini dianggap efektif mengemas wajah Arab Saudi yang selama ini terkena stigma negatif terkait isu-isu gender dan perempuan.

Dari beberapa literatur yang telah ada, penulis belum menemukan penelitian yang melihat ataupun memandang kebijakan-kebijakan hukum yang berkaitan dengan perempuan Arab Saudi yang pada masa awalnya sangat merugikan pihak perempuan, akan tetapi tahun ini mulai mengalami pergeseran ke arah modern semenjak pangeran Muhammad bin Salman memegang tongkat pemerintahan serta pergeseran karakteristik agama ketika dibenturkan dengan kepentingan nasional. Agama yang seharusnya sebagai alat penyeimbang, seakan-akan menjadi perangkat legitimasi buta dan dengan mudahnya agama berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Permasalahan kunci inilah yang kemudian akan menjadi pembahasan penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Sebuah penelitian memerlukan adanya landasan atau kerangka teori sebagai acuan agar penelitian yang dihasilkan dapat terarah sesuai dengan yang diinginkan. Teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian ini adalah teori relasi kuasa yang dicetuskan oleh Michel Foucault. Diskursus (wacana)

merupakan hal pokok dalam pemikiran Foucault. Menurutnya, diskursus dan kekuasaan datang dari orang yang memiliki kekuasaan dan bersumber dari pemikiran kreatif. Diskursus yang berhubungan erat dengan kekuasaan memberikan arti bahwa Foucault berpikir tentang kekuasaan yang tersebar dimana-mana. Foucault menyatakan bahwa penggunaan kekuasaan itu tidak hanya sebatas pada penggulingan institusi, organisasi birokrasi, ataupun negara, melainkan juga proses redistribusi pengaruh serta kemampuan mengubah pola berpikir seseorang.²⁶

Lebih jauh Foucault mengatakan bahwa kekuasaan tidak hanya mengacu pada satu sistem dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain, melainkan ada bentuk ragam relasi kuasa yaitu: *Pertama*, kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan paksaan melainkan melalui normalisasi dan regulasi. Normalisasi dalam arti menyesuaikan dengan norma-norma atau mengadakan norma-norma. Sedangkan regulasi akan menyesuaikan dengan aturan-aturan tersebut.²⁷ Kekuasaan yang menormalisasi akan beroperasi melalui mekanisme atau institusi sosial yang dibangun untuk menjamin kedisiplinan sebuah masyarakat seperti polisi agama yang dibentuk pemerintah Arab Saudi.²⁸

Hal ini tergambarkan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah Arab Saudi yang membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik seperti tidak

²⁶ Nanang Martono, *SOSIOLOGI PENDIDIKAN MICHEL FOUCAULT: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukum, Dan Seksualitas*, Cetakan ke-1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 46.

²⁷ K Bertens, *Sejarah Filsafat Kontemporer; Perancis*, Jilid II. (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 312.

²⁸ Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian; Pemikiran Kritis Post-Strukturalis* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), 9.

boleh menyetir mobil yang bertujuan untuk mendisiplinkan perempuan agar tidak melanggar aturan agama Islam yang mewajibkan dan sangat menekankan agar perempuan menutup aurat. Padahal ketika mengemudi sangat rentan dengan pelepasan jilbab seseorang.

Foucault mensymbolkan sebuah pendisiplinan dengan panoptik, yaitu sistem pengawasan yang digunakan untuk memperoleh ketaatan, keteraturan, dan normalisasi.²⁹ Hal tersebut merupakan bentuk pengawasan ataupun kontrol yang tidak kelihatan, karena kekuasaan itu terkandung dalam norma-norma yang dibangun dan diterapkan melalui sarana-sarana tertentu, salah satunya adalah diskursus pengetahuan. Pada konteks hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah Arab Saudi, bisa dikatakan bahwa kekuasaan yang menormalisasi perempuan Arab Saudi terkandung dalam undang-undang negara yang disusun oleh para ulama dan otoritas kerajaan serta diterapkan melalui diskursus pengetahuan.

Arkeologi merupakan metode yang membahas diskursus-diskursus tersebut, memusatkan perhatian bahwa diskursus tersebut memiliki muatan-muatan tersendiri, dalam hal ini aturan-aturan. Proses diskursus tersebut membentuk aturan-aturan yang kemudian dilegitimasi dan diaplikasikan dalam kehidupan sosial.³⁰ Jadi dengan metode ini akan dilacak aturan-aturan diskursus pengetahuan (dalam hal ini adalah doktrin agama), serta cara terbentuknya

²⁹ Umumnya sistem panoptik diterapkan dalam penjara, namun juga bisa diaplikasikan di dalam sistem sosial. Michel Foucault, *Power Knowledge; Wacana Penguasa/Pengetahuan*, terj. Yudi Santosa. (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), 181–183.

³⁰ Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyik Ridwan Muzir. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 250–252.

sehingga menimbulkan kebijakan-kebijakan yang cukup merugikan kaum perempuan Arab Saudi dan keberlangsungan kebijakan ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab.

Kedua, kuasa adalah sebuah strategi dengan didukung kedudukannya. Kekuasaan bukan hanya sesuatu yang terstruktur lagi, melainkan sebuah sebutan yang diberikan pada satu situasi strategis kompleks dalam tatanan masyarakat. Kekuasaan bagi Foucault adalah dimensi hidup sosial yang fundamental dan tidak dapat ditiadakan. Kekuasaan adalah soal praktek posisi yang strategis dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya serta senantiasa mengalami perubahan. Perubahan itu terlihat jelas pada keadaan perempuan Arab Saudi menghadapi aturan-aturan negara tersebut. Pada mulanya perempuan Arab Saudi sangat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan seperti halnya pelarangan mengemudi bagi mereka, dilarang menonton bola dan bioskop, serta tidak bisa menduduki posisi pemerintahan.

Akan tetapi keadaan ini berubah drastis semenjak Muhammad bin Salman mencetuskan dan mulai mengembangkan visi 2030 yang salah satu tujuannya adalah membuat wajah Arab Saudi lebih moderat dan terbuka bagi siapapun. Perjuangan bertahun-tahun kaum perempuan menuntut kebebasan sosial akhirnya dapat tercapai bersamaan dengan visi Muhammad bin Salman. Kebijakan ini disambut meriah oleh masyarakat perempuan Arab Saudi karena sekarang mereka boleh saja mengemudi mobil sendiri sesuka hati tanpa takut

ditangkap oleh polisi agama yang memang dulunya diperintahkan mengawasi dan menindak para perempuan Arab Saudi yang melanggar aturan tersebut.

Hal demikian ini menandakan bahwa terjadi pergeseran ataupun perubahan paradigma yang lebih menekankan kebebasan. Perubahan tersebut tidak terlepas dari peran dan pengaruh diskursus pengetahuan dan relasi kuasa yang tersebar melalui institusi-institusi tertentu seperti halnya media informasi yang memang sangat luas, lembaga pendidikan, ataupun juga faktor pribadi perempuan yang mulai bosan dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut yang membuat kehidupannya tidak produktif dan maksimal. Konsep geneologi Foucault ini yang akan melacak proses pembentakan pengetahuan tersebut.

Geneologi berbeda dengan arkeologi. Jika arkeologi menekankan pada aspek diskursus yakni cara-cara pembentukan dan operasional aturan-aturan diskursus itu sendiri, maka geneologi lebih memusatkan perhatiannya pada aspek relasi-relasi kuasa yang dihubungkan dengan diskursus tersebut.³¹ Konsep ini sangat penting mengingat seluruh kebijakan pemerintahan Arab Saudi tidak terlepas dari peran dan dukungan para ulama didalamnya. Sehingga proses pembentukan dan perubahan kebijakan dalam suatu negara ini akan saling berkaitan antara pemerintah dan ulama. Sebetulnya Geneologi bukanlah sebuah teori, akan tetapi lebih fokus pada cara pandang atau model perspektif untuk menempatkan diskursus, praktek sosial, dan diri kita sendiri kedalam wilayah

³¹ Petrus Sunu Hardiyanta, *Michel Foucault; Disiplin Tubuh* (Yogyakarta: LKiS, 1997), 16.

relasi kuasa, atau faktor-faktor yang membentuk pengetahuan perempuan Arab Saudi tentang kebebasan.

Ketiga, kuasa tidak bisa disentralisasikan dan dilokalisasikan, sehingga kuasa itu terdapat dimana-mana. Foucault juga mendefinisikan strategi kekuasaan sebagai sesuatu yang melekat pada kehendak untuk mengetahui melalui diskursus dan kehendak untuk mengetahui terumuskan dalam pengetahuan. Oleh karenanya kekuasaan dan pengetahuan merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.³² Kekuasaan lebih berbentuk sesuatu yang produktif dimana setiap individu bisa ambil bagian dan peran yang akan menghasilkan realitas.

Dalam konteks Arab Saudi, perempuan disana mulai sadar dan memperjuangkan hak-hak kebebasannya yang dianggap membatasi ruang gerak, kreasi, serta produktivitasnya. Awalnya hal ini sangat ditentang oleh pihak kerajaan, akan tetapi semua menjadi berubah disaat ekonomi Arab Saudi mulai melemah akibat harga minyak internasional yang terus mengalami penurunan sehingga dicanangkanlah visi 2030 oleh Muhammad bin Salman yang salah satu tujuannya adalah mereformasi kondisi ekonomi dan sosial Arab Saudi yang terkenal ultra-konservatif di mata dunia internasional.

Pengetahuan dan kesadaran tersebut terus diproduksi melalui proses-proses diskursus dan relasi kuasa dan pada saatnya akan mampu menciptakan kondisi yang lebih menekankan kebebasan dan tentunya dengan dorongan

³² *Membongkar Rezim Kepastian; Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, 16–17.

faktor-faktor internal dan eksternal. Berdasarkan paparan di atas maka dalam penulisan ini juga akan menggunakan konsep arkeologi, geneologi, dan *biopower* untuk melacak fenomena tersebut. Arkeologi digunakan untuk memetakan kebijakan-kebijakan diskursus pengetahuan tentang kebebasan, sementara geneologi digunakan untuk melihat bagaimana diskursus yang dimaksud berkaitan dengan relasi kuasa yang terdapat pada institusi-institusi tertentu yang turut memproduksi ide-ide kebebasan. Adapun *biopower*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Foucault adalah sebuah perluasan konsep kekuasaan yang semula hanya terfokus pada normalisasi individu, kemudian menuju suatu bentuk kekuasaan dengan fokus pada kehidupan manusia pada tingkat populasi.³³

Biopower ini merupakan sebuah langkah terobosan dari *power/knowledge* yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia secara umum khususnya penduduk Arab Saudi. Misalnya *biopower* ini dinyatakan dalam bentuk program-program publik massa yang mampu mengubah bentuk kondisi hidup masyarakatnya seperti pernyataan pangeran Muhammad bin Salman bahwa perempuan Arab Saudi tidak harus berkerudung atau yang disebut abaya hitam. Padahal semua orang mengetahui bahwa Saudi sebelumnya mewajibkan perempuan memakai jilbab dan kerudung yang menutup seluruh tubuhnya kecuali mata dan telapak tangan. Dari sini akan

³³ Jenny Edkins and Nick Vaughan-Williams, *Teori-Teori Kritis; Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional* (Surabaya: BACA!, 2010), 218.

terlihat jelas bagaimana peran pemerintah dalam hal ini adalah kerajaan dan ulama Saudi dalam merubah *mindset* penduduknya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif atau induktif serta analisis pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati secara ilmiah. Pusat kajiannya terdapat pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.³⁴ Penelitian ini juga menekankan pada fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, motif-motif tertentu, dan lain sebagainya secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode.³⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi tentang individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu.³⁶ Dalam konteks demikian perkembangan isu perempuan dan gender yang dibenturkan dengan politik, ekonomi, dan agama yang

³⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 5.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005),

6.

³⁶ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 47.

terjadi di Arab Saudi akan digambarkan bukan dengan angka-angka, melainkan digambarkan secara deskriptif dengan fenomena-fenomena yang melingkupinya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang didukung dengan pengamatan fenomena-fenomena perubahan hukum perempuan di Arab Saudi. Untuk itu, pengumpulan data bersumber dari pembacaan terhadap data literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut. Data yang diambil bisa dikelompokkan pada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan penulis dari sumber utama, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh namun tidak secara langsung merujuk pada sumber utamanya.³⁷ Data primer yang dimaksud adalah buku-buku yang ditulis oleh Michel Foucault, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah relasi kuasa, ideologi, dan kekuasaan. Sedangkan data sekunder berupa berbagai literatur baik berupa buku, tesis, makalah, artikel, atau karya ilmiah lainnya yang diperlukan untuk menunjang penelitian. Penulis juga melakukan eksplorasi terhadap berbagai situs di internet untuk semakin memperkaya data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

³⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 39.

4. Pendekatan

- a. Pendekatan yang pertama digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan historis yakni pendekatan yang bertujuan untuk melacak sejarah hubungan ulama dan penguasa (kerajaan) sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masyarakat Arab Saudi.
- b. Pendekatan kedua adalah pendekatan politik, kekuasaan, dan ulama dalam tubuh kerajaan Arab Saudi.

Secara garis besar, pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *filosofis*,³⁸ yaitu dengan cara menyelidiki dan berfikir secara mendalam, sehingga hikmah, hakikat atau inti dari pokok persoalan dapat dimengerti dan dipahami secara seksama.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum.³⁹ Metode ini mengkaji gagasan Michel Foucault tentang relasi kuasa dalam memandang perubahan hukum dan kebijakan yang terjadi di Arab Saudi sekarang ini terutama isu-isu perempuan dan gender setelah kendali pemerintahan berada ditangan Pangeran Muhammad bin Salman.

³⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Rafagrafindo Persada, 2002), 43.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977), 50.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami pembahasan penelitian ini, maka penulis membuat sebuah gambaran yang lebih jelas dan sistematis yang terdiri dari bab-bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini didasarkan pada fakta atau fenomena yang menarik dan menjadi kegelisahan bagi penyusun dan urgensitasnya untuk diteliti dan dihadirkan ke tengah pembaca. Bab ini juga ditujukan untuk membatasi pembahasan pada pokok-pokok masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian agar penelitian dapat terfokus. Untuk menegaskan pentingnya penelitian ini dilakukan penelusuran pustaka bahwa benar penelitian semacam ini belum dilakukan. Selain itu, pendahuluan juga memberikan keterangan mengenai kerangka teoritik dan metodologi penelitian. Serta akan memuat tentang teori relasi kuasa Michel Foucault dengan disertakan penerapannya dalam membaca kasus gender di Arab Saudi. Kemudian akan dijelaskan secara rinci konsep-konsep penting dalam teori tersebut serta bagaimana aplikasi teori kuasa-pengetahuan Foucault dipakai dalam penulisan penelitian ini.

Pada bab II akan menggambarkan bagaimana Wahabi yang didirikan oleh Abdul Wahhab mampu bertarung untuk memperoleh kekuasaan dan pengakuan di Arab Saudi serta dengan kondisi tersebut yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan kerajaan Arab Saudi. Selain itu juga akan menjelaskan reformasi Muhammad bin Salman yang sangat berkaitan dengan

masalah gender di negara tersebut. Hal ini dianggap penting yakni peran ulama dalam mengawal ataupun melegitimasi berbagai kebijakan yang ditempuh oleh kerajaan Arab Saudi. Pada bab ini juga akan dijelaskan tentang visi 2030 Arab Saudi yang dipimpin oleh Muhammad bin Salman meskipun visi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan daya saing politik luar negeri Arab Saudi ini sangat kontras dengan historis, kebijakan-kebijakan, serta pemikiran ulama sebagai dewan penasehat raja.

Adapun bab III berisi relasi pengetahuan dan kekuasaan dalam sebuah dimensi politik dan kebijakan sebuah negara. Munculnya ketidaksetaraan gender yang sangat terlihat di dunia Arab merupakan salah satu dampak pengaruh dari hubungan harmonis yang dibangun antara pengetahuan (ulama dalam konteks negara Arab Saudi) dengan penguasa (pihak kerajaan Arab Saudi). Akhirnya patriarkhisme atas nama Islam seakan-akan sudah menjadi hal yang wajar dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau bahkan penting.

Pembahasan pada bab IV adalah menjelaskan sejarah perempuan Arab Saudi di masa Islam muncul, kemudian disaat berdirinya kerajaan Arab Saudi, serta saat reformasi dimunculkan oleh Muhammad bin Salman. Juga akan dilihat gestur perubahan agama sebagai alat legitimasi politik disaat terjadi perbenturan yang bisa dilihat melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan kerajaan Arab Saudi yang berkaitan dengan kehidupan sosial perempuan di sana.

Pada bab V yang merupakan bab terakhir dari penelitian ini akan berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi statemen-statement hasil penelitian dan saran-saran berisi usulan-usulan penulis bagi berbagai pihak terkait hasil penelitian ini. Kesimpulan ditujukan untuk mendeskripsikan secara singkat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok masalah, sementara saran-saran ditujukan sebagai anjuran penulis terkait hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan di bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan serta menjawab rumusan masalah diatas bahwa peranan agama dalam menjadikan sebuah kekuasaan disuatu tempat memang sangat penting. Faktor identitas (Islam) merupakan asas penting dan berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan dalam negara Arab Saudi. Dengan kondisi tersebut maka Arab Saudi sebagai negara dengan landasan hukum Islam tidak akan pernah terlepas dengan ulama dalam setiap kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya dan hal tersebut sangat terlihat sekali dalam pembahasan diatas.

Hubungan ulama dan kerajaan Arab Saudi merupakan hubungan resiprokal yang sudah lama terbangun dan menghasilkan deklarasi kerajaan Arab Saudi. Sehingga dua komponen ini menjadi kunci utama negara Arab Saudi dalam mengawal keputusan-keputusan dan kebijakan yang ditempuh, serta fatwa para ulama yang terus mengawal jalannya kebijakan sehingga masyarakat mudah untuk menerima hal tersebut.

Isu perempuan dan gender yang selama ini dipandang negatif oleh dunia internasional menjadi tonggak sejarah dalam wacana modernisasi agar dapat terealisasi di Arab Saudi. Reformasi Arab Saudi melalui visi 2030 yang dicituskan Muhammad bin Salman dengan mengakomodir isu-isu gender dan perempuan menjadi problem baru bagi pandangan beberapa ulama. Di satu sisi

keadaan sosial perempuan Arab Saudi berubah drastis semenjak keputusan tersebut yang tujuannya untuk memajukan ekonomi negara Arab Saudi agar tidak bergantung dengan hasil minyak yang selama ini menjadi sumber komoditas utama dalam menyuplai kekayaan negara cukup logis. Akan tetapi di sisi lain, kebijakan ini menjadikan keadaan sosial perempuan Arab Saudi semakin terbuka dengan modernisasi. Hal ini sangat kontradiksi dengan kondisi ultra-konservatif Arab Saudi sebelumnya dan fatwa-fatwa ulama yang melarang keras segala bentuk aktivitas luar perempuan Arab Saudi jika tanpa disertai mahramnya seperti mengemudi, menonton bola, menginap di hotel, menjadi pejabat pemerintah, menonton bioskop, menjadi tentara, dan masih banyak lagi.

Seperti halnya di negara lain, ulama Arab Saudi juga tidak satu pandangan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Dewan ulama senior yang sekarang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah al-Syekh yang merupakan pengganti dari Abdullah bin Baz dan beberapa anggotanya menjadi sumber legitimasi agama utama pemerintah dalam menentukan langkah kebijakan yang ditempuh. Sedangkan ulama yang harus berhadapan dengan pihak kerajaan karena berseberangan dengannya adalah Sahwa Salman al-Awda, Safar al-Hawali, Yufuf al-Ahmad, Hatim al-Awni, dan beberapa nama lainnya. Mereka semua mendapatkan perlakuan buruk dari pemerintah Arab Saudi karena berbeda pandangan dan visi di dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Adapun masa depan gender di Arab Saudi melalui pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa isu gender dan perempuan di Arab Saudi akan terus berkembang ke arah modern searah dengan kebutuhan negara yang membutuhkan pemasukan ekonomi melalui berbagai bidang tidak hanya minyak semata. Dengan kebijakan Muhammad bin Salman, diharapkan bermunculan pengusaha-pengusaha perempuan yang mampu mendorong ekonomi masyarakat dan negara Arab Saudi seperti Maria Mahdaly yang usahanya menjadi perusahaan tercepat perkembangannya di Arab Saudi. Oleh sebab itu, isu perempuan akan terus menjadi kata kunci dalam reformasi Arab Saudi karena negara ini sudah di nilai buruk oleh dunia internasional.

B. SARAN

Apa-apa yang ditulis dalam penelitian ini bukan berarti usaha terakhir dalam sebuah pembahasan. Akan tetapi akan menjadikan semakin terbukanya kemungkinan pembahasan-pembahasan yang lebih luas dan mendalam dari berbagai aspek yang berkaitan dengan reformasi Arab Saudi. Seperti halnya aspek eksistensi ajaran Wahabi jika dibenturkan dengan kebijakan-kebijakan negara yang lebih mengakomodasi modernitas dan sekulerisasi dalam setiap langkahnya. Selain itu, bagaimana peran media massa di Arab Saudi didalam lingkup pemerintahan Arab Saudi baik yang satu pandangan dengan pemerintah maupun yang berbeda pandangan dengan pemerintah.

Penulis tidak menafikan bahwa dalam membahas permasalahan ini banyak kekurangan dan keterbatasan dalam mengeksplorasi secara detail dan mendalam terkait hubungan antara kuasa, agama, dan perempuan di Arab Saudi. Oleh sebab itu penulis berharap pembahasan tema-tema diatas akan terus berlanjut dengan referensi-referensi yang lebih baru dan tajam dalam menganalisa fenomena tersebut, karena pada dasarnya isu-isu yang terjadi di Arab Saudi akan terus bergulir dan berkembang sehingga sangat dimungkinkan terjadi dalam setiap dekadenya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal & Artikel

- bin Abdul Wahhab, Muhammad. *Nawaqid Al-Islam al-'Ashrah*. Mekkah: Dar Ibn 'Umar, 2003.
- Abidin, Zaenal. "Wahabisme, Transnasionalisme, Dan Gerakan-Gerakan Radikal Islam Di Indonesia." *Tasamuh* 12 (June 2015).
- Abou El Fadl, Khaled. *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Adams, Ian. *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, Dan Masa Depan*. Yogyakarta: Qalam, 2004.
- Agustina, Hiqma Nur. "Perjuangan Perempuan Saudi Arabia Dalam Novel Misteri Mencari Nouf Karya Zoe Ferraris." Jakarta: Jurnal Perempuan, 2016.
- Agustono, Ihwan. "Dinamika Politik Islam Semenanjung Arab 1800-1930 M Dan Pengaruh Berdirinya Kerajaan Arab Saudi Modern Terhadap Praktik Keagamaan" 3. Maraji: Jurnal Studi Keislaman (September 2016).
- Ahmad, Jamil. *Seratus Muslim Terkemuka*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Algar, Hamid. *Wahhabisme: Sebuah Tinjauan Kritis*. Terj. Rudy Harisyah Alam. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Ali Engineer, Asghar. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Althusser, Louis. *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultur Studies*. Yogyakarta: JALASUTRA, 2004.
- Amstrong, H.C. *Sang Penjegal: Kisah Ibn Saud Menguasai Arabia*. Jakarta: Ramala Books, 2008.
- Aswar, Hasbi. "Pengaruh Ulama Dalam Politik Di Negara Muslim: Studi Kasus Arab Saudi." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 2 (March 2015).
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Bashin, Kamala. *What Is Patriarchy*. Terj. Nursyahbani Katjasungkana. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996.
- ibn Baz, Abdul Aziz bin Abdullah. *Imam Muhammad Bin Abdul Wahhab Dakwah Dan Jejak Perjuangannya*. Jakarta: Megatama Sofwa Pressindo, 2005.
- Bertens, K. *Sejarah Filsafat Kontemporer; Perancis*. Jilid II. Jakarta: PT Gramedia, 2014.
- Commins, David. *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*. London: I.B Tauris & Co Ltd, 2006.
- Doumato, Eleanor A. "Gender, Monarchy, and National Identity in Saudi Arabia." *British Journal of Middle Eastern Studies* 19 (1992).
- Dwi Hartanto, Roni. "Mengkaji Relasi Agama Dan Ideologi." *Academic Journal of Islamic Studies* I (April 2016).
- Edkins, Jenny, and Nick Vaughan-Williams. *Teori-Teori Kritis; Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*. Surabaya: BACA!, 2010.
- El-Affendi, Abdelwahab. *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Elizabeth Shakman, Hurd. *The Politics of Secularism in International Relations*. New Jersey: Princeton University Press, 2008.
- Foucault, Michel. *Arkeologi Pengetahuan*. Terj. Inyik Ridwan Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- . *Power Knowledge; Wacana Penguasa/Pengetahuan*. Terj. Yudi Santosa. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.
- Fox, Jonathan, and Shmuel Sandler. *Bringing Religion into International Relations*. New York: Palgrave Macmillan, 2004.
- Gamble, Sarah. *Pengantar Memahami Feminisme Dan Postfeminisme*. Yogyakarta: JALASUTRA, 2010.
- Golley, Nawar Al-Hassan. "Is Feminism Relevant to Arab Women?" *Taylor & Francis Group* 25 (2004).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977.
- Haif, Abu. "Perkembangan Islam Di Arab Saudi (Studi Sejarah Islam Modern)" III. *Jurnal Rihlah* (October 1, 2015).

- Hamdan, Amani. "The Role of Authentic Islam: The Way Forward For Women in Saudi Arabia." *Journal of Women of the Middle East and the Islamic World* (2012).
- . "Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievements." *International Education Journal* (2005).
- Hamim, Thoha. *Islam Dan NU Di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer: Dialektika Kehidupan Politik, Agama, Pendidikan Dan Sosial Masyarakat Muslim*. Surabaya: Diantama, 2004.
- Hans J, Morgenthau. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Hardiyanta, Petrus Sunu. *Michel Foucault; Disiplin Tubuh*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Haryadi, Panji. "Peran Muhammad Bin Salman Terhadap Perubahan Pilar Kenegaraan Arab Saudi" 2. ICMES (June 2008).
- Haryatmoko. *Membongkar Rezim Kepastian; Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Hasyim, Syafiq. *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*. Depok: KataKita, 2010.
- Hegghammer, Thomas. *Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism 1979*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Hidriyah, Sita. "Reformasi Ekonomi Arab Saudi." *INFO Singkat Hubungan Internasional*. Badan Keahlian DPR RI, May 2016.
- Hinnebusch, Raymond. *The International Politics of the Middle East*. Manchester: Manchester University Press, 2003.
- Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Societies*. London: Yale University Press, 1968.
- Inlehart, R, and P Norris. *Rising Tide: Gender and Cultural Change around the World*. Cambridge University Press, 2004.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Jamilah, Maryam. *Para Mujahid Agung*. Bandung: Mizan, 1989.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Agama Dan Politik: Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama." *Walisongo* 22 (May 2014).

- Kechichian, Joseph A. "The Role of The Ulama in the Politics of an Islamic State: The Case of Saudi Arabia." *International Journal of Middle East Studies* 18 (1986).
- Lacroix, Stephane. *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia*. Cambridge: Harvard University Press, 2011.
- Lewis, Bernard. *Krisis Islam Antara Jihad Dan Teror Yang Keji*. Jakarta: Ina Publikatama, 2004.
- M Lapidus, Ira. *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Maliki, Zainuddin. *Agama Priyai: Makna Agama Di Tangan Elite Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Marhumah. "Konstruksi Gender, Hegemoni Kekuasaan, Dan Lembaga Pendidikan." *KARSA* 19 (2011).
- Marines, and Alejandra Galindo. "The Relationship between the Ulama and the Government in the Contemporary Saudi Arabian Kingdom: An Interdependent Relationship?" *Durham University* (2001).
- Martono, Nanang. *SOSIOLOGI PENDIDIKAN MICHEL FOUCAULT: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, Dan Seksualitas*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- MD, Mohammad Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Mohammad DKK, Herry. *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Mortimer, Edward. *ISLAM Dan KEKUASAAN*. Terj. Enna Hadi dan Rahmani Astuti. Bandung: MIZAN, 1984.
- Muawanah, Elfi. *Menuju Kesetaraan Gender*. Malang: Kutub Minar, 2006.
- Mughis Mudhoffir, Abdil. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik." *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT* Vol. 18, No. 1 (January 2013).
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Munif, Achmad. *50 Tokoh Politik Legendaris Dunia*. Jakarta: Buku Kita, 2007.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Rafagrafindo Persada, 2002.

- Noor, Yusliani. *SEJARAH TIMUR TENGAH (ASIA BARAT DAYA)*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Noventari, Widya. "Peran Diplomasi Politik Luar Negeri Dan Angkatan Perang Dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (August 2014).
- Nurmila, Nina. "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya." *KARSA* 23 (June 2015).
- Peterson, J. E. *Historical Dictionary of Saudi Arabia*. Second Edition. Oxford: The Scarecrow Press, 2003.
- Prihantono, H. *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik Dan Kebijakan*. Jakarta: Propatria Institute, 2007.
- Rachbini, Didik J. *Ekonomi Politik Dan Teori Pilihan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Rachmadie, Cammelianne Typhano, and Suryo Ediyono. "Reformasi Sistem Kebudayaan Di Arab Saudi Masa Pemerintahan Raja Abdullah (2005-2015)." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 2 (June 2017).
- Raji Abdullah, M. Sufyan. *Mengenal Aliran-Aliran Dalam Islam Dan Ciri-Ciri Ajarannya*. Jakarta: Pustaka Al-Riyadh, 2006.
- Rasheed, Madawi. *Contesting the Saudi State: Islamic Voices from a New Generation*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Roji, Fatkhur. "Kebijakan Ruang Publik Perempuan: Agenda Politik Double Interest Saudi." *International Journal Ihya 'Ulum Al-Din* 19 (2017).
- Rosida, Anis. "Wacana Modernisasi Dalam Tantangan Peradaban, Peran Perempuan Sebagai Tonggak Sejarah Arab Saudi." *PALITA: Journal of Social-Religion Research* 3 (April 2018).
- Septi, Cahya Wahyu. "Peran Ormas Perempuan Terhadap Kebangkitan Peradaban Islam." *MUSAWA* 11 (January 2012).
- Solihah, Ratnia. "Pola Relasi Bisnis Dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking" 1 (2016).
- Subhani, Ja'far. *Syekh Muhammad Bin Abdul Wahhab Dan Ajarannya*. Terj. Arif M dan Nainul Aksa. Jakarta: Citra, 2007.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Sugiyono, Sugeng. "Feminisme Di Dunia Islam: Menguak Akar Perdebatan Antara Paham Konservatif Dan Reformis." *THAQAFIYYAT* 14 (2013).
- Sumadi. "Ideologi Bias Gender Dalam Lembaran Fikih Di Indonesia." *Journal for Islamic Studies al-Afkar* 1 (January 2018).
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Waskito, Am. *Bersikap Adil Kepada Wahabi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Yatim, Badri. *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci: Hijaz (Mekah Dan Madinah) 1800-1925*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Zubaedah, Siti. "Mengurai Problematika Gender Dan Agama." *YINYANG* 5 (December 2010).

Website

- Akeel, Maha. "The Case for Gender Equality in the Muslim World." Accessed November 17, 2019. <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/04/case-gender-equality-muslim-world-170424095756513.html>.
- Avenue, Human Rights Watch | 350 Fifth, 34th Floor | New York, and NY 10118-3299 USA | t 1.212.290.4700. "Saudi Arabia: Free Islamic Scholar Who Criticized Ministry." *Human Rights Watch*. Last modified July 14, 2011. Accessed November 7, 2019. <https://www.hrw.org/news/2011/07/14/saudi-arabia-free-islamic-scholar-who-criticized-ministry>.
- Bishin, Benjamin G., and Feryal M. Cherif. "Analysis | The Big Gains for Women's Rights in the Middle East, Explained." *Washington Post*. Accessed November 16, 2019. <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/07/23/womens-rights-are-advancing-in-the-middle-east-this-explains-why/>.
- CNN, Lauren Said-Moorhouse. "Saudi Arabia Curbs Its Religious Police." *CNN*. Accessed November 7, 2019. <https://www.cnn.com/2016/04/14/middleeast/saudi-arabia-religious-police-powers/index.html>.
- developer, mediaindonesia.com. "Perempuan Arab Saudi Rayakan Kebebasan." Last modified June 25, 2018. Accessed November 20, 2019.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/167986-perempuan-arab-saudi-rayakan-kebebasan>.

Gibreel, Gibreel. "The Ulema: Middle Eastern Power Brokers." *Middle East Quarterly*, 2001. <https://www.meforum.org/105/the-ulema-middle-eastern-power-brokers>.

Media, Kompas Cyber. "5 Kebijakan Baru Arab Saudi untuk Perempuan, Boleh Menyetir hingga Jadi Tentara Halaman all." *KOMPAS.com*. Accessed November 20, 2019. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/14/063104365/5-kebijakan-baru-arab-saudi-untuk-perempuan-boleh-menyetir-hingga-jadi>.

Misrawi, Zuhairi. "Gerbang Kesetaraan Perempuan Arab Saudi." *Detiknews*. Accessed December 3, 2019. <https://news.detik.com/kolom/d-3661732/gerbang-kesetaraan-perempuan-arab-saudi>.

Powell, Mike. "Islam and the Liberation of Women in the Middle East | Center for Inquiry," November 10, 2018. Accessed November 16, 2019. <https://centerforinquiry.org/blog/islam-and-the-liberation-of-women-in-the-middle-east/>.

"5 Kebijakan Baru Arab Saudi yang 'Membebaskan' Perempuan." *kumparan*. Accessed December 3, 2019. <https://kumparan.com/kumparannews/5-kebijakan-baru-arab-saudi-untuk-perempuan>.

"A Changing Future: The Economic Role of Women in Saudi Arabia | Abdul Latif Jameel®." *Abdul Latif Jameel*, n.d. Accessed November 27, 2019. <https://www.alj.com/en/perspective/changing-future-economic-role-women-saudi-arabia/>.

"Abdullah dari Arab Saudi." *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, October 26, 2019. Accessed November 21, 2019. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdullah_dari_Arab_Saudi&oldid=16095368.

"Council of Senior Ulama." Accessed November 2, 2019. <https://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sa-ulama.htm>.

"DON'T Wear the Veil, Saudi Cleric Reiterates on TV." Accessed November 7, 2019. <http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/12/15/DON-T-wear-the-veil-Saudi-cleric-says-in-new-fatwa-.html>.

"Law and Women in the Middle East." Accessed November 16, 2019. <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/law-and-women-middle-east>.

- “Perjalanan Panjang Hak-Hak Perempuan Di Arab Saudi — Liputan Islam,” n.d. Accessed November 22, 2019. <http://liputanislam.com/internasional/perjalanan-panjang-hak-hak-perempuan-di-arab-saudi/>.
- “Saudi Ulama, Guardians of Change.” *Fondazione Internazionale Oasis*. Accessed November 7, 2019. <http://www.oasiscenter.eu/en/saudi-ulama-guardians-change>.
- “Sederet Prestasi Raja Arab Abdullah - Dunia Tempo.Co.” Accessed November 22, 2019. <https://dunia.tempo.co/read/637054/sederet-prestasi-raja-arab-abdullah/full&view=ok>.
- “Women and Gender Roles in the Middle East.” *TeachMideast*, n.d. Accessed November 16, 2019. <http://teachmideast.org/articles/introduction-women-gender-roles-middle-east/>.
- “Women Can Drive Now in Saudi Arabia. Here’s What They Still Can’t Do.” *Fortune*. Accessed November 27, 2019. <https://fortune.com/2017/09/28/saudi-arabia-women-driving-economic-effect/>.
- “Yoga Hingga Bioskop, 7 Hal Yang Kini Dihalalkan Oleh Arab Saudi - Global Liputan6.Com.” Accessed December 3, 2019. <https://m.liputan6.com/global/read/3224899/yoga-hingga-bioskop-7-hal-yang-kini-dihalalkan-oleh-arab-saudi>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Syaiful Kamal, S.Hum
Tempat/tgl. Lahir : Kediri/ 18 Mei 1994
Alamat : Jl. Pare-Wates Sidomulyo, Puncu, Kab. Kediri
Nama Ayah : Nasruddin
Nama Ibu : Siti Mujayanah
E-mail : kamalsyaiful1@gmail.com
No. HP : 085645986263

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI Islamiyah Kediri (2003-2008)
- b. Mts Negeri 6 Kediri (2008-2010)
- c. MAN 1 Kota Kediri (2010-2013)
- d. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2017)

2. Pendidikan Non-Formal

- a. PP. Al-Amien Kota Kediri (2010-2013)
- b. English Course Beswan Pare Kediri (2015)
- c. PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta (2013-Sekarang)

C. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Putra PP. Al-Luqmaniyyah (2015-2016)
2. Bendahara Putra PP. Al-Luqmaniyyah (2016-2017)
3. Bendahara Pusat PP. Al-Luqmaniyyah (2017-2019)
4. Wakil Lurah PP. Al-Luqmaniyyah (2019-Sekarang)
5. Dewan Pendidikan PP. Al-Luqmaniyyah (2019-Sekarang)

D. Minat Keilmuwan

1. Politik Timur Tengah
2. Politik Perempuan
3. Sastra Arab
4. Studi Islam

E. Karya Ilmiah

1. Artikel Jurnal

- a. Jurnal Lisanuna, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Judul: Perbandingan Struktur Kata Sifat Dalam Bahasa Arab dengan Bahasa Indonesia, Terbit tahun 2018.
- b. Jurnal Diwan, UIN Alauddin Makassar, Judul: Dimensi Konflik Sosial Pemerintahan Husni Mubarak Dalam Novel Šauratu al-Araya (Telaah Sosiologi Sastra), Terbit tahun 2018.
- c. Jurnal Periode, Universitas Negeri Jakarta, Judul: Motif dan Perjuangan Suku Kurdistan Dalam Mendirikan Negara, Tahun 2019 (Proceeding).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA